

# GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

# PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 28 TAHUN 2018

### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2017, namun perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;
  - b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dimaksud karena terdapat 3 unit Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan 2 Unit Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2017, 5 Satuan Pendidikan yang mengalami Perubahan Jenis Status dari SMAN menjadi SMKN, 2 Satuan Pendidikan yang mengalami Perubahan Jenis Status dari SMKN menjadi SMAN, perubahan nama dan nomenklatur SMKN dan SLBN, serta terdapat 1 Sekolah Luar Biasa Swasta (SLBS) mengalami perubahan jenis status menjadi Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat yang Istimewa;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 4);
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor134);
- 14. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 10);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

### Pasal I

Lampiran I Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 10) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

> Ditetapkan di Mataram pada tanggal 20 4gustus 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H M ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

### DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN SMA, SMK, DAN SLB DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

_	1. KOTA MATARAM					
A. SATUAN PENDIDIKAN SMA		B. SATUAN PENDIDIKAN SMK				
1	SMA NEGERI 1 MATARAM	1	SMK NEGERI 1 MATARAM			
2	SMA NEGERI 2 MATARAM	2	SMK NEGERI 2 MATARAM			
3	SMA NEGERI 3 MATARAM	3	SMK NEGERI 3 MATARAM			
4	SMA NEGERI 4 MATARAM	4	SMK NEGERI 4 MATARAM			
5	SMA NEGERI 5 MATARAM	5	SMK NEGERI 5 MATARAM			
6	SMA NEGERI 6 MATARAM	6	SMK NEGERI 6 MATARAM			
7	SMA NEGERI 7 MATARAM	7	SMK NEGERI 7 MATARAM			
8	SMA NEGERI 8 MATARAM	8	SMK NEGERI 8 MATARAM			
9	SMA NEGERI 9 MATARAM	9	SMK NEGERI 9 MATARAM			
10	SMA NEGERI 10 MATARAM					
C.	SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS					
1	SLB NEGERI 1 MATARAM					
2	SLB NEGERI 2 MATARAM					

	2. KABUPATEN LOMBOK BARAT						
A.	A. SATUAN PENDIDIKAN SMA		B. SATUAN PENDIDIKAN SMK				
1	SMA NEGERI 1 BATULAYAR	1	SMK NEGERI 1 BATULAYAR				
2	SMA NEGERI 1 GERUNG	2	SMK NEGERI 1 GERUNG				
3	SMA NEGERI 2 GERUNG	3	SMK NEGERI 2 GERUNG				
4	SMA NEGERI 1 GUNUNGSARI	4	SMK NEGERI 1 GUNUNGSARI				
5	SMA NEGERI 1 KEDIRI	5	SMK NEGERI 1 KEDIRI				
6	SMA NEGERI 1 KURIPAN	6	SMK NEGERI 1 KURIPAN				
7	SMA NEGERI 1 LABUAPI	7	SMK NEGERI 2 KURIPAN				
8	SMA NEGERI 2 LABUAPI	8	SMK NEGERI 1 LABUAPI				
9	SMA NECERI 1 LEMBAR	9	SMK NEGERI 1 LEMBAR				
10	SMA NEGERI 2 LEMBAR	10	SMK NEGERI 1 LINGSAR				
11	SMA NEGERI 3 LEMBAR	11	SMK NEGERI 2 LINGSAR				
12	SMA NEGERI 1 LINGSAR	12	SMK NEGERI 1 NARMADA				
13	SMA NEGERI 1 NARMADA	13	SMK NEGERI 1 SEKOTONG				
14	SMA NEGERI 2 NARMADA	14	SMK NEGERI 2 SEKOTONG				
15	SMA NEGERI 1 SEKOTONG						
c.	SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS						
1	SLB NEGERI 1 LOMBOK BARAT						
2	SLB NEGERI 2 LOMBOK BARAT						

3. KABUPATEN LOMBOK TENGAH					
A. SATUAN PENDIDIKAN SMA		B. SATUAN PENDIDIKAN SMK			
1	SMA NEGERI 1 BATUKLIANG	1			
2	SMA NEGERI 1 BATUKLIANG UTARA	2	SMK NEGERI 1 BATUKLIANG UTARA		
3	SMA NEGERI 1 JANAPRIA	3	SMK NEGERI 1 JANAPRIA		
4	SMA NEGERI 1 JONGGAT	4	SMK NEGERI 1 JONGGAT		
5	SMA NEGERI 2 JONGGAT	5	SMK NEGERI 1 KOPANG		
6	SMA NEGERI 1 KOPANG	6	SMK NEGERI 1 PRAYA		
7	SMA NEGERI 1 PRAYA	7	SMK NEGERI 1 PRAYA BARAT		
8	SMA NEGERI 2 PRAYA	8	SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH		
9	SMA NEGERI 3 PRAYA	9	SMK NEGERI 2 PRAYA TENGAH		
10	SMA NEGERI 4 PRAYA	10	SMK NEGERI 1 PRAYA TIMUR		
11	SMA NEGERI 1 PRAYA BARAT	11	SMK NEGERI 1 PUJUT		
12	SMA NEGERI 1 PRAYA BARAT DAYA	12	SMK NEGERI 2 PUJUT		
13	SMA NEGERI 1 PRAYA TENGAH	13	SMK NEGERI 1 PRINGGARATA		
14	SMA NEGERI 1 PRAYA TIMUR				
15	SMA NEGERI 1 PRINGGARATA				
16	SMA NEGERI 2 PRINGGARATA				
17	SMA NEGERI 1 PUJUT				
18	SMA NEGERI 2 PUJUT				
c. 1	SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS				
1	SLB NEGERI 1 LOMBOK TENGAH				
2	SLB NEGERI 2 LOMBOK TENGAH				
3	SLB NEGERI 3 LOMBOK TENGAH				

_	4. KABUPATEN LOMBOK TIMUR					
A. SATUAN PENDIDIKAN SMA		В.	SATUAN PENDIDIKAN SMK			
1	SMA NEGERI 1 AIKMEL	1	SMK NEGERI 1 KERUAK			
2	SMA NEGERI 2 AIKMEL	2	SMK NEGERI 1 PRINGGABAYA			
3	SMA NEGERI 1 JEROWARU	3	SMK NEGERI PRINGGASELA			
4	SMA NEGERI 1 KERUAK	4	SMK NEGERI 1 SAKRA			
5	SMA NEGERI 1 LABUHAN HAJI	5	SMK NEGERI 1 SELONG			
6	SMA NEGERI 1 MASBAGIK	6	SMK NEGERI 2 SELONG			
7	SMA NEGERI 2 MASBAGIK	7	SMK NEGERI 3 SELONG			
8	SMA NEGERI 1 MONTONG GADING	8	SMK NEGERI 1 SAMBELIA			
9	SMA NEGERI 1 PRINGGABAYA	9	SMK NEGERI 1 SIKUR			
10	SMA NEGERI 1 PRINGGASELA	10	SMK NEGERI 1 KOTARAJA			
11	SMA NEGERI 1 SAKRA	11	SMK NEGERI 2 KERUAK			
12	SMA NEGERI 1 SAKRA TIMUR					
13	SMA NEGERI 1 SAMBELIA					
14	SMA NEGERI 1 SELONG					
15	SMA NEGERI 2 SELONG					
16	SMA NEGERI 3 SELONG					
17	SMA NEGERI 1 SEMBALUN					
18	SMA NEGERI 1 SIKUR					
19	SMA NEGERI 1 SUELA					
20	SMA NEGERI 1 SUKAMULIA					
21	SMA NEGERI 1 SURALAGA					

22	SMA NEGERI 1 TERARA	
23	SMA NEGERI 1 WANASABA	
C. 1	SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS	
1	SLB NEGERI 1 LOMBOK TIMUR	
2	SLB NEGERI 2 LOMBOK TIMUR	

5. KABUP	ATEN	LOMBOK UTARA
A. SATUAN PENDIDIKAN SMA	25.7	SATUAN PENDIDIKAN SMK
1 SMA NEGERI 1 BAYAN	1	SMK NEGERI 1 BAYAN
2 SMA NEGERI 2 BAYAN	2	SMK NEGERI 1 GANGGA
3 SMA NEGERI 1 GANGGA	3	SMK NEGERI 1 KAYANGAN
4 SMA NEGERI 1 KAYANGAN	4	SMK NEGERI 1 PEMENANG
5 SMA NEGERI 1 PEMENANG	5	SMK NEGERI 1 TANJUNG
6 SMA NEGERI 1 TANJUNG	6	SMK NEGERI 2 TANJUNG
7 SMA NEGERI 2 TANJUNG		Since Housed 2 Talloung
C. SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS		
1 SLB NEGERI 1 LOMBOK UTARA		

10.1	6. KABI	PATE	EN SUMBAWA		
A. SATUAN PENDIDIKAN SMA		255	B. SATUAN PENDIDIKAN SMK		
1	SMA NEGERI 1 ALAS	1	SMK NEGERI 1 ALAS		
2	SMA NEGERI 1 ALAS BARAT	2	SMK NEGERI 1 BUER		
3	SMA NEGERI 1 EMPANG	3	SMK NEGERI 1 LENANGGUAR		
4	SMA NEGERI 1 LABANGKA	4	SMK NEGERI 1 LOPOK		
5	SMA NEGERI 1 LABUHAN BADAS	5	SMK NEGERI 1 LUNYUK		
6	SMA NEGERI 1 LAPE	6	SMK NEGERI 1 PLAMPANG		
7	SMA NEGERI I LUNYUK	7	SMK NEGERI I SUMBAWA BESAR		
8	SMA NEGERI I MARONGE	8	SMK NEGERI 2 SUMBAWA BESAR		
9	SMA NEGERI 1 MOYO HULU	9	SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR		
10	SMA NEGERI 1 MOYO UTARA	10	SMK NEGERI 1 TARANO		
11	SMA NEGERI 1 ORONG TELU	11	SMK NEGERI 1 LABUHAN BADAS		
12	SMA NEGERI 1 PLAMPANG		SIME REGERT I LABOHAN BADAS		
13	SMA NEGERI 1 RHEE				
14	SMA NEGERI 1 ROPANG				
15	SMA NEGERI 1 SUMBAWA BESAR				
16	SMA NEGERI 2 SUMBAWA BESAR				
17	SMA NEGERI 3 SUMBAWA BESAR				
18	SMA NEGERI 4 SUMBAWA BESAR				
19	SMA NEGERI 1 UTAN				
	C. BATUAN PENDIDIKAN	-			
1	SLB NEGERI 1 SUMBAWA				
2	SLB NEGERI 2 SUMBAWA				

	7. KABUPATEN SUMBAWA BARAT					
A. SATUAN PENDIDIKAN SMA		В.	SATUAN PENDIDIKAN SME			
1	SMA NEGERI 1 BRANG REA	1	SMK NEGERI 1 BRANG ENE			
2	SMA NEGERI 1 JEREWEH	2	SMK NEGERI 1 BRANG REA			
3	SMA NEGERI 1 POTO TANO	3	SMK NEGERI 1 MALUK			
4	SMA NEGERI 1 SEKONGKANG	4	SMK NEGERI 1 SETELUK			
5	SMA NEGERI 1 SETELUK	5	SMK NEGERI 1 TALIWANG			
6	SMA NEGERI 1 TALIWANG	100				
7	SMA NEGERI 2 TALIWANG	-				
c.	SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS					
1	SLB NEGERI 1 SUMBAWA BARAT					

_	8. 1	ABUPA	TEN DOMPU		
A.	A. SATUAN PENDIDIKAN SMA		B. SATUAN PENDIDIKAN SMK		
1	SMA NEGERI 1 DOMPU	1	SMK NEGERI 1 DOMPU		
2	SMA NEGERI 2 DOMPU	2	SMK NEGERI 2 DOMPU		
3	SMA NEGERI 3 DOMPU	3	SMK NEGERI 1 HUU		
4	SMA NEGERI 1 HUU	4	SMK NEGERI 1 KEMPO		
5	SMA NEGERI 1 KEMPO	5	SMK NEGERI 1 KILO		
6	SMA NEGERI 2 KEMPO	6	SMK NEGERI 1 MANGGELEWA		
7	SMA NEGERI 1 KILO	7	SMK NEGERI 2 MANGGELEWA		
8	SMA NEGERI 2 KILO	8	SMK NEGERI 1 PEKAT		
9	SMA NEGERI 1 MANGGELEWA	9	SMK NEGERI I WOJA		
10	SMA NEGERI 2 MANGGELEWA		1		
11	SMA NEGERI 1 PAJO				
12	SMA NEGERI 1 PEKAT				
13	SMA NEGERI 2 PEKAT				
14	SMA NEGERI 3 PEKAT				
15	SMA NEGERI 1 WOJA				
16	SMA NEGERI 2 WOJA				
17	SMA NEGERI 3 WOJA				
18	SMA NEGERI 3 KILO				
	SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS				
1 5	SLB NEGERI 1 DOMPU	1996			

	9. KABUPATEN BIMA				
A. SATUAN PENDIDIKAN SMA		B. SATUAN PENDIDIKAN SMK			
1	SMA NEGERI 1 AMBALAWI	1 SMK NEGERI I LAMBU			
2	SMA NEGERI 1 BELO	2 SMK NEGERI I WOHA			
3	SMA NEGERI 1 BOLO	3 SMK NEGERI I WERA			
4	SMA NEGERI 2 BOLO	4 SMK NEGERI I LANGGUDU			
5	SMA NEGERI 3 BOLO	5 SMK NEGERI I DONGGO			

6	SMA NEGERI 1 DONGGO	6	SMK NEGERI I SANGGAR
7	SMA NEGERI 2 DONGGO		SMK NEGERI I SOROMANDI
8	SMA NEGERI 3 DONGGO	8	
9	SMA NEGERI 1 LAMBITU	2 2 2 2 2	PARTITION I BOLO
10	SMA NEGERI 1 LAMBU		SMK NEGERI I PALIBELO
11	SMA NEGERI 2 LAMBU	11	SMK NEGERI 2 WERA
12		12	SMK NEGERI 2 SOROMANDI
13	SMA NEGERI 2 LANGGUDU	13	SMK NEGERI 2 LANGGUDU
14	SMA NEGERI 3 LANGGUDU		- Land Data Good Do
15	SMA NEGERI 1 MADAPANGGA		
16			
17			
18	SMA NEGERI 2 MONTA		
19	SMA NEGERI 1 PALIBELO		
20	SMA NEGERI I PARADO		
21	SMA NEGERI 1 SANGGAR		
22	SMA NEGERI 1 SAPE	-	
23	SMA NEGERI 2 SAPE		
24	SMA NEGERI 3 SAPE		
25	SMA NEGERI I SOROMANDI	_	
26	SMA NEGERI 2 SOROMANDI	-	
27	SMA NEGERI 3 SOROMANDI		
28	SMA NEGERI 2 SANGGAR		
29	SMA NEGERI 1 TAMBORA		
30	SMA NEGERI I WAWO	7	
31	SMA NEGERI 2 WAWO		
32	SMA NEGERI 1 WERA	-	
33	SMA NEGERI 2 WERA		
34	SMA NEGERI 3 WERA	-	
35	SMA NEGERI 1 WOHA		
36	SMA NEGERI 2 WOHA	-	
C.	SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS		
1	SLB NEGERI I BIMA	+	

10. KOTA BIMA					
A. :	SATUAN PENDIDIKAN SMA	В.	SATUAN PENDIDIKAN SMK		
1	SMA NEGERI 1 KOTA BIMA	1	SMK NEGERI 1 KOTA BIMA		
2	SMA NEGERI 2 KOTA BIMA	2	SMK NEGERI 2 KOTA BIMA		
3	SMA NEGERI 3 KOTA BIMA	3	SMK NEGERI 3 KOTA BIMA		
4	SMA NEGERI 4 KOTA BIMA	4	SMK NEGERI 4 KOTA BIMA		
5	SMA NEGERI 5 KOTA BIMA				
c.	SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS				
1	SLB NEGERI 1 KOTA BIMA				

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. M. ZAINUL MAJDI